

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 228 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pacet untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pacet, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pacet untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Pacet untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Pacet;
(2) Renja Kecamatan Pacet Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pacet tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pacet;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Pacet dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Pacet;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Pacet yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Pacet digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Pacet selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029.

## BAB II
## DOKUMEN RENJA KECAMATAN PACET

### Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Pacet Tahun 2026 disusun dengan sistemika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Pacet tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Pacet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III
## KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN PACET

### Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Pacet menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Pacet meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Pacet sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Pacet dengan DPRD; dan
d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Pacet.

Pasal 7

(1) Kecamatan Pacet membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Pacet.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Pacet disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Pacet tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Pacet melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pacet dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Pacet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Pacet terhadap pelaksanaan dan hasil Kecamatan Pacet.

(3) Camat Pacet menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Pacet.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pacet dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

## BAB V
## PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PACET

### Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Pacet dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pacet beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Pacet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Pacet tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 228

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 228 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
PACET TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga rancangan awal Renja merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan ranwal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Penyusunan Rancangan awal Renjana Kerja Kecamatan Pacet tentunya dengan Pagu Teknoratik yang belum dilakukan analisis terhadap kebutuhan nyata di Kecamatan Pacet namun demikian Rancangan awal ini merupakan bagian dari proses yang harus dilaksanakan agar tingkat kesesuai anggaran yang tersedia dapat sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.580-Adpem/2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pacet, terdiri dari 29 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 320 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis pelimpahan antara lain: Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan.

Dalam rangka memberikan acuan terhadap terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

Peyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacet Tahun 2026 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2021 – 2026 dan juga menyelerasakan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);

n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Kecamatan Pacet Tahun Anggaran 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pacet

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pacet adalah sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara teadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Pacet, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Kecamatan Pacet, proses penyusunan Renja Kecamatan Pacet, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Pacet Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pacet.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Pacet serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Pacet Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pacet

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pacet

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacet

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pacet

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet

3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Pacet Tahun Lalu dan Capaian renstra Kecamatan

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pacet telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan ( tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Pacet yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan).

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan (2025) disesuaikan dengan hasil input data e-monev pada e-monev yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif.

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU**)**

Kecamatan Pacet Tahun 2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83,66 Poin | 87,06 Poin | 104,06% |

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet pada tahun 2024 mencapai 104,06 %.

Data Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu (2024) sebagaimana pada tabel 2.2 dibawah ini .

Tabel 2. 2

Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran DPA Tahun 2024 | Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Tingkat Capaian Kinerja (%) | Tingkat Capaian Realisasi Anggaran(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | Rp 5,952,069,759.00 | Rp 5,763,056,109.00 | 105.12 | |
| | | | | 109.13 | |
| | | | | 104.46 | |
| | | | | 100 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 4,896,940,885.00 | Rp 4,738,554,309.00 | 105.12 | 96.77 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 8,000,000.00 | Rp 8,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 200 | 100 |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 3,975,272,354.00 | Rp 3,833,626,390.00 | 100 | 96.44 |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 3,970,772,354.00 | Rp 3,829,126,790.00 | 98.74 | 96.43 |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,499,600.00 | 100 | 99.97 |
| 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 5,000,000.00 | Rp 4,774,000.00 | 100 | 95.48 |
| 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp 3,000,000.00 | Rp 2,824,000.00 | 100 | 94.13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp 2,000,000.00 | Rp 1,950,000.00 | 100 | 97.5 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 375,023,952.00 | Rp 373,648,324.00 | 100 | 99.63 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 4,416,000.00 | Rp 4,363,800.00 | 100 | 98.82 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 266,408,200.00 | Rp 265,904,300.00 | 100 | 99.81 |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 2,000,000.00 | Rp 1,969,000.00 | 100 | 98.45 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 3,000,000.00 | Rp 2,776,224.00 | 100 | 92.54 |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp 9,783,020.00 | Rp 9,750,000.00 | 100 | 99.66 |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 89,416,732.00 | Rp 88,885,000.00 | 100 | 99.41 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 31,614,000.00 | Rp 31,523,100.00 | 100 | 99.71 |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Rp 31,614,000.00 | Rp 31,523,100.00 | 100 | 99.71 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 332,539,580.00 | Rp 322,661,095.00 | 100 | 97.03 |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | 200 | 100 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 34,355,980.00 | Rp 28,017,015.00 | 100 | 81.55 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 295,683,600.00 | Rp 292,144,080.00 | 100 | 98.8 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 166,490,999.00 | Rp 161,321,400.00 | 109.13 | 96.89 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 49,076,999.00 | Rp 44,816,400.00 | 100 | 91.32 |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 5,000,000.00 | Rp 4,990,000.00 | 100 | 99.8 |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 112,414,000.00 | Rp 111,515,000.00 | 100 | 99.2 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp 435,186,840.00 | Rp 419,026,000.00 | 104.46 | 96.29 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp 22,405,000.00 | Rp 22,350,000.00 | 100 | 99.75 |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Rp 11,635,000.00 | Rp 11,625,000.00 | 100 | 99.91 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp 10,770,000.00 | Rp 10,725,000.00 | 100 | 99.58 |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Rp 37,372,200.00 | Rp 36,694,000.00 | 100 | 98.19 |
| 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Rp 12,514,200.00 | Rp 11,836,000.00 | 100 | 94.58 |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 24,858,000.00 | Rp 24,858,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rp 37,960,000.00 | Rp 37,445,000.00 | 100 | 98.64 |
| 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan | Rp 37,960,000.00 | Rp 37,445,000.00 | 100 | 98.64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rp 337,449,640.00 | Rp 322,537,000.00 | 100 | 95.58 |
| 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Rp 337,449,640.00 | Rp 322,537,000.00 | 133.33 | 95.58 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 242,834,518.00 | Rp 231,062,200.00 | 100 | 95.15 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp 167,314,518.00 | Rp 155,992,400.00 | 100 | 93.23 |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Rp 30,000,000.00 | Rp 29,260,000.00 | 100 | 97.53 |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Rp 6,811,998.00 | Rp 6,500,000.00 | 100 | 95.42 |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 130,502,520.00 | Rp 120,232,400.00 | 300 | 92.13 |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Rp 75,520,000.00 | Rp 75,069,800.00 | 100 | 99.4 |
| 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Rp 36,370,000.00 | Rp 36,370,000.00 | 200 | 100 |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Rp 24,150,000.00 | Rp 24,069,800.00 | 100 | 99.67 |
| 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Rp 15,000,000.00 | Rp 14,630,000.00 | 100 | 97.53 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 70,261,236.00 | Rp 70,190,000.00 | 100 | 99.9 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp 54,155,000.00 | Rp 54,140,000.00 | 100 | 99.97 |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp 39,155,000.00 | Rp 39,140,000.00 | 200 | 99.96 |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp 15,000,000.00 | Rp 15,000,000.00 | 100 | 100 |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rp 16,106,236.00 | Rp 16,050,000.00 | 100 | 99.65 |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Rp 16,106,236.00 | Rp 16,050,000.00 | 100 | 99.65 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp 145,611,280.00 | Rp 144,970,400.00 | 100 | 99.56 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rp 145,611,280.00 | Rp 144,970,400.00 | 100 | 99.56 |
| 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Rp 45,000,000.00 | Rp 44,936,400.00 | 100 | 99.86 |
| 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra | Rp 70,611,280.00 | Rp 70,074,000.00 | 100 | 99.24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | |
| 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 6,000,000.00 | Rp 5,980,000.00 | 100 | 99.67 |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Rp 24,000,000.00 | Rp 23,980,000.00 | 100 | 99.92 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 161,235,000.00 | Rp 159,253,200.00 | 100 | 98.77 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp 161,235,000.00 | Rp 159,253,200.00 | 100 | 98.77 |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Rp 10,595,000.00 | Rp 10,167,600.00 | 200 | 95.97 |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Rp 93,620,000.00 | Rp 93,322,600.00 | 100 | 99.68 |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Rp 30,000,000.00 | Rp 29,113,000.00 | 100 | 97.04 |
| 7.01.06.2.01.0014 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Rp 6,750,000.00 | Rp 6,500,000.00 | 100 | 96.3 |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Rp 10,460,000.00 | Rp 10,400,000.00 | 100 | 99.43 |
| 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Rp 9,810,000.00 | Rp 9,750,000.00 | 100 | 99.39 |

Dari tabel di atas Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran**:**

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah ada pada Nomor Rekening yang lain.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 81,55% persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100% , hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut ada alokasi lain yang sudah menutupi kinerja, walaupun demikian guna menunjang IKU tetap kegiatannya dilaksanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari – hari bersejarah, dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target Kegiatan yang dilaksanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Capaian Kinerja di Kecamatan Pacet yang hampir secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

   Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

   a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.
   b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
   c. Perubahan Kebijakan/Aturan

Tabel 2. 3 T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pacet dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Pacet s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pacet

| Kode | | | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2024 | Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD 2024 | Realisasi Renja PD Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan | Tingkat Capaian Target Renstra (%) |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nilai AKIP | 77,06 | 75,80 Poin | 70,52 Poin | 75,80 Poin | 107,63% | 70,52 Poin | ` | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | 4 | 2 | 2 | 100,00% | 1 | 7 | 140 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 90,91 |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 15 | 9 | 3 | 3 | 100,00% | 3 | 15 | 100 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | 5 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 9 | 30,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 28 | 13 | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 21 | 75 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1320 | 756 | 252 | 252 | 100,00% | 252 | 1260 | 95,45 |
| 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |
| 7.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Daerah | Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 125 |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Terknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 | 61 | 20 | 20 | 100,00% | 20 | 101 | 126,25 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 11 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 90,91 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 71,43 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 | 13 | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 21 | 105 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 62,5 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 36 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 60 | 100 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | 36 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 60 | 100 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 22 | 15 | 5 | 5 | 100,00% | 5 | 25 | 113,6 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 | 9 | 3 | 3 | 100,00% | 3 | 15 | 100 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86,70 Poin | | 80,37 Poin | 80,37 Poin | 98,37% | 81,70 Poin | | |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan | 80,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.03.2.03.05 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 80,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 100 |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 100 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 100 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 10 | 6 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 10 | 100 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 80,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 125 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah | 100,00% | | 0 | 0% | 0% | 100,00% | | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 995 | 690 | 230 | 230 | 100,00% | 230 | 1150 | 115,577,889 |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 100 |
| 7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 80 | 50 | 20 | 20 | 100,00% | 30 | 100 | 125 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100,00% | | 69,23% | 69,23% | 69,23% | 100,00% | | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang dibina | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 49 | 38 | 13 | 13 | 100,00% | 13 | 64 | 130,61 |
| 7.01.06.2.01.15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 100 |
| 7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 100 |
| 7.01.06.2.01.14 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 4 | 100 |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 100 |
| 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 2 | 100 |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 6 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 5 | 83,33 |
| 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 3 | 100,00 |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan kecamatan pacet pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), indikator – indikator tersebut merupakan target dari capaian indikator sasaran dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target capaian dan hasil pengukuran kinerja, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan pacet sebagai sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan kinerja dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian kinerja, sehingga capaian kinerja yang diperoleh dari hasil kerja dan kinerja perangkat daerah merupakan implementasi dari sebuah perenccanaan.

Analisis kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Analisis kinerja pelayanan di kecamatan pacet merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya

sebagaimana tergambar pada tabel 2.3 mengenai pencapaian kinerja pelayanan kecamatan pacet.

Tabel 2. 4 T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | Catatan Analisis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | Nilai AKIP | | | 68,47 | 70,52 | 72,64 | 74,82 | 77,06 | 75,70 | 75,80 | 80,10 | 80,40 | 80,60 | Capaian Nilai AKIP Tahun 2024 telah melampaui target. Untuk Realisasi Tahun 2024 HASIL Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten bandung sebesar 80,10 dari tahun sebelumbya. |
| 2 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | 80,10 | 81,70 | 87,06 | 87,06 | 87,25 | 80,64 | 83.34 | 87,06 | 87,06 | 87,25 | Indek Kepuasan Masyarakat target untuk tahun 2024 sudah tidak relevan namun demikian target masih tetap dikarenakan belumdilakukan perubahan kedua pada Renstra Tahun 2021-2026 , |
| 3 | Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik | | | 81,41 | 82,01 | 83,66 | 85,33 | 86,70 | 95,34 | 89,49 | 90,95 | 92,00 | 91,00 | Dengan adanya pendataan dan penertiban aset serta pengadaan pada Tahun 2024 Target Aset dalam keadaan baik realisasi tercapai sesuai target. |
| 4 | Desa Cepat Berkembang | | | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | Capaian Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan Desa serta pembinaan administrasi Desa, telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target Desa ber administrasi Baik |

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Kinerja Kecamatan Pacet

   Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pacet telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

   Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

   a. Melaksanakan pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Pacet berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung No. 137.1/Kep.580.adpem/2018 yang terdiri dari 29 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mandatory dan program Prioritas Bupati Bandung.
   b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain:
      1. Perizinan
      2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
      3. Melaksanakan Program Kewilayan
      4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
      5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Permasalahan dan Hambatan

   Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

   Permasalahan :

   a. Belum optimalnya pelayanan Publik.

b. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat (Delegatif);

c. Belum optimalnya Pelaksanaan Tugas Atributif yang melekat pada Kecamatan

Hambatan :

1. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
2. Belum optimalnya dukungan anggaran terhadap kewenangan yang dilimpahkan.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh, meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan .

4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada

A. Kekuatan
   1) Adanya dukungan anggaran.
   2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik
   3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
   4) sinergitas dan soliditas aparatur

B. Kelemahan
   1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru.
   2) Kapasitas SDM Aparatur
   3) Belum optimalnya pembangunan sarana publik yang memadai (RTH)

4) Belum adanya penunjang sarana pelayanan publik yaitu Sarana bermain anak yang merupakan saran penunjang pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5) Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
6) Pengumpulan data pembangunan dari unit kerja belum optimal.

C. Tantangan

1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentang SOP pelayanan.
3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih.
4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang).
5) Jauhnya jarak pelayanan Pacet – Soreang husunya dalam pelayanan Akte Kelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan.

D. Peluang

1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

5. Formulasi isu – isu penting.

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang direncanakan antara lain:

1) Meningkatkan kapasitas sdm aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bandung.

2) Melaksanakan pembinanan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi perundang – undangan kaitan dengan tugas dan fungsi aparatur.
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk setiap bidang dan sub bidang.
5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi kependudukan.
6) Meningkatkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan.
7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani pembuatan ktp, kk, perizinan, perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di kecamatan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

   Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

   Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

   Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

   Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

   Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuh

# Tabel 2. 5 T-C.31

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
## Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung

| Kode Rekening | | | | Rancangan Awal RKPD tahun 2026 | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | Anggaran Sebelum Perubahan (Ranwal Renja 2026) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | Anggaran Sesudah Perubahan (Pergeseran Renja 2026) |
| 1 | | | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP | 80.4 Poin | 4.282.539.293,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah<br>2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah | 60 Poin<br>40 Poin | 4,741,988,000,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 Persen | 11.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 80,5 Poin | 43,000,000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 10,000,000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 5.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | 1.000.000,00 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | 10.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100 Persen | 3.816.876.293,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100 Persen | 4,012,825,000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 252 Orang/bulan | 3.810.876.293,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 252 Orang/bulan | 4,006,825,000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 2.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 2.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 2.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 1.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan | 100 Persen | 3.000.000,00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan | 100 Persen | 3.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan | 100 Persen | 2.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan | 100 Persen | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 1.000.000,00 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 Orang | 2.500.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 1.000.000,00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 Orang | 2.500.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | 100 Persen | 101.163.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | 100 Persen | 194,772,500,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 5.000.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 8.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 25.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 35.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 5.000.000,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 13.500.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.500.000,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.500.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 53.663.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 115,772,500,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 8.000.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 46.890.500,00 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 1.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 30.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 6.000.000,00 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 16.890.500,00 |
| 1 | 1 | 2 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 290.500.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 363.500.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.500.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 253.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 341.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 90.95 Persen | 50.000.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 90.95 Persen | 73.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 35.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 58.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 5.000.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 5.000.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 10.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 10.000.000,00 |
| 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM | 87.06 Poin | 290.000.000,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat | 100 Persen | 423,422,483,00 |
| 1 | 2 | 2 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 Persen | 35.000.000,00 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 Persen | 26.000.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 13,000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 13,000.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan | 100 Persen | 35.000.000,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain | 100 Persen | 26.000.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 13,000.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 13,000.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100 Persen | 20.000.000,00 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100 Persen | 25,000.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100 Persen | 200.000.000,00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100 Persen | 346,422,483,00 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 Laporan | 200.000.000,00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 Laporan | 346,422,483,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100 Persen | 115.000.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina | 100 Persen | 171.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | 50.000.000,00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | 46.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 13.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 20.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi | 100 Persen | 35.000.000,00 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi | 100 Persen | 50.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 10.000.000,00 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 Laporan | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100 Persen | 30.000.000,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100 Persen | 75.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 Keluarga | 5.000.000,00 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 Keluarga | 150.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 50 Keluarga | 5.000.000,00 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 50 Keluarga | 10.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 50 Keluarga | 5.000.000,00 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 50 Keluarga | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 9 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 50 Keluarga | 5.000.000,00 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 50 Keluarga | 10.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 50 Keluarga | 5.000.000,00 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 50 Keluarga | 15.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 50 Keluarga | 5.000.000,00 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 50 Keluarga | 15.000.000,00 |
| 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 Persen | 65.000.000,00 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 Persen | 70.000.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | 45.000.000,00 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | 50.000.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 30.000.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | 10.000.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | 20.000.000,00 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | 20.000.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 20.000.000,00 |
| 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah | 100 Persen | 95.000.000,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah | 100 Persen | 130.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 Persen | 95.000.000,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 Persen | 130.000.000,00 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 20 Orang | 25.000.000,00 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 20 Orang | 50.000.000,00 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 200 Orang | 40.000.000,00 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 200 Orang | 50.000.000,00 |
| 1 | 5 | 2 | 5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Laporan | 5.000.000,00 |
| 1 | 5 | 2 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Desa Cepat Berkembang | 1 Desa | 85.000.000,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Desa Cepat Berkembang | 1 Desa | 123.000.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100 Persen | 85.000.000,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100 Persen | 123.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13 Dokumen | 20.000.000,00 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | 5.000.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 9 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 40.000.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 14 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1 Dokumen | 13.000.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 15.000.000,00 |
| | | | | JUMLAH KEWILAYAHAN | | | 650.000.000,00 | JUMLAH KEWILAYAHAN | | | 917,422,483,00 |
| | | | | JUMLAH TOTAL | | | 4.932.539.293,00 | JUMLAH TOTAL | | | 5,659,410,483,00 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

Kegiatan musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan perundang – undangan bahwa usulan program kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah desa melalui musrenbang desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas pembangunan di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan.

Musrenbang kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari desa dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu bidang soial.budaya, bidang ekonomi, dan bidang infrastruktur.

Dari hasil musrenbang tersebut didokumentasikan oleh tim musrenbang kecamatan ke dalam daftar skala prioritas kecamatan untuk diusulkan pada musrenbang di tingkat kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari desa yang diusulakan melalui musrenbang kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah, namun demikian karena dibatasi kuota pagu anggaran kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kecamatan.

Daftar skala prioritas kecamatan untuk di desa – desa yang disetujui masuk dalam rkp opd/dinas terkait dan rkpd kabupaten bandung dan untuk program kegiatan di kecamatan diolah melalui renstra yang terbagi dalam urusan rutin dan kewilayahan

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan daerah dengan kegiatan musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh dinas teknis terkait.

Adapaun usulan musrenbang tahun 2026 sampai saat ini masih dalam proses penginputan di tingkat desa dan menunggu kegiatan musrenbang tingkat kecamatan/kabupaten.

1. Usulan dalam daftar skala prioritas berjumlah usulan : 847

2. Usulan yang telah disetujui dalam forum pd usulan : 300

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026,

dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa desa di Kecamatan Pacet.

Tabel 2. 6 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

| DAFTAR SKALA PRIORITAS ( DSP ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KECAMATAN PACET UNTUK USULAN DESA REGULER DAN KOMPETITIP TAHUN 2026 | | | | | |
| No | Usulan | Permasalahan | Alamat | Kelurahan | Status |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIHIL

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala- kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam
2. rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk lebih jelasnya program yang mendukung prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1

Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Prioritas Nasional

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | Program Kecamatan |
|---|---|---|---|
| PN<br>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan | P4<br>Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi | P13<br>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata | 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | Program Kecamatan |
|---|---|---|---|
| dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, | Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance | Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik | 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN<br>4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br>5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM<br>6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |

*Sumber Bapperida, diolah*

Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 Sesuai dengan Misi yang diemban Kecamatan dengan Visi "*TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG LEBIH BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS, SEJAHTERA (BEDAS) MAJU, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS*" Kecamatan Pacet harus berkontribusi terhadap tercapainya Visi tersebut dengan mengemban Tugas Misi No 3. "*Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel".*

Kecamatan pacet sebagai bagian dari perangkat daerah di kabupaten bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari renstra dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten bandung dengan sasaran rpjmd kabupatenm bandung tahun 2025 – 2029 mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, treansparan dan akuntabel.

Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD , selain melaksanakan kegiatan yang bersipat atributif dan delegatif sebagai pemegang mandatori kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat, selain membawa misi No 3, kecamatan pacet harus memberikan kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong atau memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan untuk mendukung dinas/instansi lain dalam menjalan program kegiatan di wsilayah kecamatan pacet.

Fasilitasi dan koordinasi terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan program pembangunan lainnya dengan tuijuan mendorong terhadap capaian ipm kecamatan pacet guna berkontribusi capaian ipm kabupaten bandung untuk menmendukung terhadap kinerja pelayanam publ;ik, kecamatan dituntut untuk melakukan inovasi diberbagai bidang terutama sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pacet

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) , Maju, Dan Berkelanjutna menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, Kompetitif dan Berahlak serta penguatan Kesetaraan gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transfaran dan Akuntabel;

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Kecamatan Pacet menetapkan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati. Serta berpedoman kepada Renstra 2025-2029. Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pacet dapat dilihat pada gambar berikut ini :

A. Tujuan

Tujuan Kecamatan Pacet dalam penyelenggaraan Pemerintahan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

Adapun sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pacet untuk tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

dalam Adapun target kinerja Kecamatan Pacet Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet Tahun 2026

| Tujuan | Sasaran | Tujuan/Sasaran Indikator | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas pelayanan public | | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 0,22 |
| | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan | Nilai IKM | 87,25 |

Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pacet pada Tahun Anggaran 2026 pda table 3.3 dibawah ini

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | Laju IKM<br><br>Saran: Laju Nilai Sinergritas | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | | | Nilai IKM<br><br>Saran: Nilai Sinergritas (dikeluarkan oleh tapem) | |
| | | | Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah | | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat<br><br>Saran: IKM Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| | | | | | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
| | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | | | Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
| | | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |
| | | | | | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| | | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Perizinan Non Usaha | | |
| | | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
| | | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| | | | Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| | | | | | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| | | | | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
| | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
| | | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| | | | | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan |
| | | | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
| | | | | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
| | | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| | | | | | Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |
| | | | | | | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |
| | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antarKeluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |
| | | | | | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri |
| | | | Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib | | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | | Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| | | | Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan | | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| | | | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan | | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa<br><br>Saran:<br>Rata-rata nilai evaluasi perkembangan desa dari seluruh desa di wilayah Kecamatan pada Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan (pelaksanaan monev sesuai dengan permendagri 72 dengan perbup oleh dpmd berbeda) | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | | Persentase desa yang dibina dan diawasi | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi dan visi Kabupaten Bandung dengan ke 4, yaitu: *"Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan".* dengan gerakan Sabilulungan sebagai semangat gotong - royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Pacet dalam perencanaan Tahun 2026 akan melaksanakan 6 Program dan 17 kegiatan antara lain:

Kesesuaian Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2026 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Pacet dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Pacet pada Tahun 2026 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Staff harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

Tabel 3. 4 T-C.33

Rumusan Rencana Akhir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Manajamen Risiko Perangkat daerah<br>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 40 Poin<br>60 Poin | 4.741.988.000,00 | | | | | | - | 4.282.539.293,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 80.50 Poin | 43.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | - | 11.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, | Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kel/Desa | | memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai | Aparatur | | 2.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan | Aparatur | | 2.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good | Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean | Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100 % | 4.012.825.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | - | 3.816.876.293,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 252 Orang/bulan | 4.006.825.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas | Aparatur | | 3.810.876.293,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | penyeludupan. | Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 2.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya | Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | penyeludupan. | Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 2.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD | 100 % | 3.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | - | 3.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola | Masyarakat dan Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan | Masyarakat dan Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu | 100 % | 5.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | - | 2.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 Orang | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 Orang | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 194.772.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | - | 101.163.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 25.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 13.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 2.500.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 10.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 115.772.500,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 53.663.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah | Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 % | 46.890.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 8.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 16.890.500,00 | Kab. Bandung, Pacet, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, | Masyarakat dan Aparatur | | 6.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Semua Kel/Desa | | birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 1.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 363.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai | Masyarakat dan Aparatur | - | 290.500.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 2.500.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan | Masyarakat dan Aparatur | | 35.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 341.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 253.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 93 % | 73.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance | Masyarakat dan Aparatur | - | 50.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 58.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 35.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | judi, dan penyeludupan. | Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 10.000.000,00 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat | 100 % | 423.422.483,00 | | | | | | - | 290.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 Persen | 26.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good | Masyarakat dan Aparatur | - | 35.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 15.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain | 100 % | 26.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | - | 35.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas | Masyarakat dan Aparatur | | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | penyeludupan. | Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 25.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100 Persen | 25.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, | Masyarakat dan Aparatur | - | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100 % | 346.422.483,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan | Masyarakat dan Aparatur | - | 200.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | dan Pelayanan Publik | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 346.422.483,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 200.000.000,00 |
| 3 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang dibina | 100 % | 171.000.000,00 | | | | | | - | 115.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 46.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 50.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola | Masyarakat dan Aparatur | | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi | 100 % | 50.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan | Masyarakat dan Aparatur | - | 35.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 10.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan | Masyarakat dan Aparatur | | 15.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 10.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.06 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100 % | 75.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | - | 30.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 Keluarga | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 100 Keluarga | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 100 Keluarga | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 50 Keluarga | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 50 Keluarga | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 50 Keluarga | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 70.000.000,00 | | | | | | - | 65.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 50.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | - | 45.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 25.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 20.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | - | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |
| 5 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100 % | 130.000.000,00 | | | | | | - | 95.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | 130.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan | Masyarakat dan Aparatur | - | 95.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 20 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 25.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 200 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan | Masyarakat dan Aparatur | | 40.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan | Masyarakat dan Aparatur | | 25.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | |
| 6 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa | 100 % | 123.000.000,00 | | | | | | - | 85.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100 % | 123.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | - | 85.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0014 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan | Masyarakat dan Aparatur | | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | dan Pelayanan Publik | | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan | Masyarakat dan Aparatur | | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | |
| | **JUMLAH** | | | | | | | | **5.659.410.483,00** | | | | | | | | **4.932.539.293,00** |

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Pacet Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2026 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Tabel 4. 1 T-C.41

Rumusan Rencana Ahir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kabupaten Bandung

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana |
| | KECAMATAN PACET | | | 5.659.410.483,00 | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Manajamen Risiko Perangkat daerah<br>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 40 Poin<br>60 Poin | 4.741.988.000,00 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 80.50 Poin | 43.000.000,00 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | |
| | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100 % | 4.012.825.000,00 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 252 Orang/bulan | 4.006.825.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD | 100 % | 3.000.000,00 | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu | 100 % | 5.000.000,00 | | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 Orang | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 Orang | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 194.772.500,00 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 13.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | |
| | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 115.772.500,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 % | 46.890.500,00 | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pengadaan Mebel | | | | | |
| | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 16.890.500,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | |
| | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 363.500.000,00 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 341.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 93 % | 73.000.000,00 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 58.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | |
| | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat | 100 % | 423.422.483,00 | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 Persen | 26.000.000,00 | | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain | 100 % | 26.000.000,00 | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100 Persen | 25.000.000,00 | | |
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100 % | 346.422.483,00 | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 346.422.483,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang dibina | 100 % | 171.000.000,00 | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 46.000.000,00 | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi | 100 % | 50.000.000,00 | | |
| | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100 % | 75.000.000,00 | | |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | |
| | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 Keluarga | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 100 Keluarga | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | |
| | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 100 Keluarga | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | |
| | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 50 Keluarga | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | |
| | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 50 Keluarga | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | | | |
| | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 50 Keluarga | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 70.000.000,00 | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 50.000.000,00 | | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 20.000.000,00 | | |
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100 % | 130.000.000,00 | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | 130.000.000,00 | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 20 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 200 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa | 100 % | 123.000.000,00 | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100 % | 123.000.000,00 | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | | **J U M L A H** | **5.659.410.483,00** | | |

# BAB V

# P E N U T U P

Rancangan awal rencana kerja kecamatan pacet kabupaten bandung tahun 2026 merupakan dokumen awal perencanaan tahunan yang berlandaskan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd), rkpd tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten bandung tahun 2021-2026 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas kecamatan pacet maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi kecamatan pacet dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Dengan disusunnya rancangan awal renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan opd :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja opd
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan kantor kecamatan pacet dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi kabupaten bandung.

Soreang,  Juli 2025

CAMAT PASET

Ttd

ASEP SUSANTO

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

# DAFTAR ISI

**BAB I 8**

**PENDAHULUAN ..... 8**

1.1 Latar Belakang ..... 8

1.2 Landasan Hukum ..... 9

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 11

1.4 Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II 14**

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU ..... 14**

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Pacet Tahun Lalu dan Capaian renstra ..... 14

Kecamatan ..... 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 29

Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Pacet ..... 31

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah ..... 32

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang) ..... 49

**BAB III 51**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 51**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 51

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pacet ..... 53

3.3 Program dan Kegiatan ..... 61

**BAB IV 106**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 106**

**BAB V 102**

**P E N U T U P ..... 102**

# DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ..... 14
TABEL 2. 2 ..... 15
TABEL 2. 3 T-C.29 ..... 23
TABEL 2. 4 T-C. 30 ..... 31
TABEL 2. 5 T-C.31 ..... 36
TABEL 2. 6 T-C.32 ..... 50

TABEL 3. 1 ..... 51
TABEL 3. 2 ..... 54
TABEL 3. 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 ..... 56
TABEL 3. 4 T-C.33 ..... 62

TABEL 4. 1 T-C.41 ..... 107